

**DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN
PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**



**Gender Analysis Pathway (GAP) dan
Gender Budget Statement (GBS)**

TAHUN ANGGARAN 2022



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN
DAN PERTANAHAN
Jl. Pahlawan Rawang Painan

Nomor : 600/ 108 /Perkimtan-PS/III/2021
Lampiran :
Perihal : *Pengiriman Gender Analysis Pathway
(GAP) dan Gender Budget Statement
(GBS)*

Painan, 26 Maret 2021

Kepada.
Yth. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak
Pesisir Selatan
di
Tempat

Dengan Hormat,

Menindaklanjuti Surat Sekretaris Daerah Kab. Pesisir Selatan No:
048/461/DSPPrPA-PS/III/2021 tanggal 15 Maret 2021 perihal tersebut diatas,
bersama ini disampaikan kepada Bapak GAP dan GBS Tahun 2022 Dinas
Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pesisir
Selatan sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan, atas perhatian Bapak diucapkan terima kasih.

Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan
Permukiman dan Pertanahan
Kabupaten Pesisir Selatan


MUKHRIDAL, SH
NIP. 19640128 199309 1 001

MATRIK GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)

OPD : DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Data Dasar (Base-Line)	Indikator Gender
Program: Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah total rumah di Kab. Pesisir Selatan sampai kondisi Tahun 2019 adalah 114.238 rumah. Adapun jumlah rumah berdasarkan kondisi layak/tidak layak yaitu: Layak (111.771 rumah) dan Tidak Layak (2.467 rumah).	Isu kesenjangan yang dapat disimpulkan antara lain: a. Aspek Akse: Tidak semua rumah tidak layak huni bisa direhabilitasi. Akses penerima bantuan dan kriteria kegiatan terbatas. b. Aspek Partisipasi: Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menentukan skala prioritas	keterbatasan anggaran. Dinas belum memiliki data base yang valid jumlah rumah tidak layak huni Masih kurangnya pemahaman wali nagari tentang kriteria rumah tidak layak huni yang berpengaruh terhadap data	Masih banyaknya data-data rumah tidak layak huni yang belum divalidasi Lahan yang digunakan untuk pembangunan RTLH belum bebas atau belum dihibahkan	Terwujudnya Rumah Layak Huni di kab. Pesisir Selatan	- Pendataan dan Validasi Data Rumah Tidak Layak Huni - Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni dan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni - Melakukan Evaluasi terhadap tenaga pendamping RTLH	Jumlah rumah tahun 2017 sebanyak 107.469 dari 182 Nagari di kabupaten Pesisir Selatan. Adapun rumah layak 113.778 rumah dan tidak layak 6.309 rumah Tahun 2018 Jumlah rumah menjadi 114.188 rumah, adapun yang layak 110.095 rumah dan tidak layak 4.093 Rumah. Pada tahun 2019 jumlah rumah meningkat 114.238 sedangkan jumlah	Kegiatan 1: Perbaikan Rumah Tidak Layak huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha Input : Rp. 9.484.879.890,- Output: Tersedianya pembangunan
Sub Kegiatan: Perbaikan Rumah Tidak Layak huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	- Jumlah rumah tidak layak huni yang sudah direhap dari tahun 2017-2019 sebanyak 4.960 unit rumah - Sasaran							

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Data Dasar (Base-Line)	Indikator Gender
diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha Sub Kegiatan: Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha Tujuan: Tertaksananya Pembangunan Rumah tidak layak Huni dan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Kab. Pesisir Selatan	jumlah rumah yang tidak layak huni yang akan direhap sebanyak 2.467 unit rumah Dasar hukum kegiatan Permendagri Nomor 90 tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi, dan Nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan Daerah	kebutuhan primer dan sekunder nya. c. Aspek Kontrol: kontrol dari tenaga pendamping berpengaruh terhadap pelaksanaan rumah layak huni d. Aspek Manfaat: Karna bantuan rumah tidak layak huni masih bersifat stimulan (ransangan) dan masyarakat harus menyediakan dana tambahan untuk menyelesaikan pembangunan rumah					RTLH adalah 2.467 unit, adapun rumah layak huni menjadi 111.771 Unit Tahun 2020 Jumlah Rumah 114.308, penagangan RTLH Tahun 2020 sebanyak 2.309 unit. Jumlah rumah tidak layak huni yang sudah direhap dari tahun 2017-2020 sebanyak 7.937 unit rumah Secara penanganan dan target penanganan berdasarkan data TNP2K Tahun 2016 Jumlah RTLH adalah 6.387 Unit. Jadi total penanganan sudah melbihin 1.552. unit.	Rumah tidak layak huni dan Rehab Rumah Tidak Layak Huni Outcome: Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni bagi Masyarakat berpenghasilan Rendah Kegiatan 2 : Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha Input : Rp. 165.501.820,-

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi		
							Data Dasar (Base-Line)	Indikator Gender
								Output: Tersedianya Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha Outcome: Meningkatnya Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Data Dasar (Base-Line)	Indikator Gender
Prasarana, sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk menunjang Fungsi Hunian	- Masih banyak rumah masyarakat berpenghasilan rendah yang belum memiliki sanitasi layak - Masih banyak rumah masyarakat berpenghasilan rendah yang belum memiliki sambungan listrik	Isu kesenjangan yang dapat disimpulkan antara lain: a. Aspek Akses: Tidak semua rumah masyarakat bias dibantu sanitasi layak dan sambungan listrik. b. Aspek Partisipasi: Akses penerima bantuan dan kriteria kegiatan terbatas. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menentukan skala prioritas kebutuhan primer dan sekunder nya. c. Aspek Kontrol: kontrol dari tenaga pendamping berpengaruh terhadap	keterbatasan anggaran. Dinas belum memiliki data base yang valid jumlah Masyarakat yang belum memiliki sanitasi layak dan sambungan listrik Masih kurangnya pemahaman wali nagari tentang kriteria masyarakat penerima bantuan adalah masyarakat berpenghasilan rendah	Masih banyaknya data-data rumah yang belum divalidasi Lahan yang digunakan untuk pembangunan Sanitasi Layak yang belum bebas atau belum dihibahkan	Terwujudnya Rumah Bersanitasi Layak dan Memiliki Sambungan Listrik di kab. Pesisir Selatan,	- Pendataan dan Validasi Data Sanitasi Layak dan Sambungan Listrik - Sambungan Listrik Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah - Melakukan Evaluasi terhadap Hasil Kegiatan	- Berdasarkan proposal dari wali nagari masih ada data masyarakat yang belum memiliki jamban. Data yang masuk dari wali nagari sebanyak 3.252 unit - Data Masyarakat yang belum memiliki Sambungan Listrik sebanyak 2.896 Unit - Penanganan Sanitasi Tahun 2017 – 2020 : 1.626 Unit - Penanganan Sambungan Listrik 2017 – 2020 sebanyak 1.417 Unit	Kegiatan 1 : Penyediaan Prasarana, sarana dan Utilitas umum di Perumahan untuk menunjang Fungsi Hunian Input : Rp 2.033.281.760,- Output: Tersedianya PSU Perumahan untuk meningkatkan fungsi hunian Outcome: Meningkatnya Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk menunjang
Sub Kegiatan: Penyediaan Prasarana, sarana dan Utilitas umum di Perumahan untuk menunjang Fungsi Hunian Sub Kegiatan: Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan	Dasar hukum kegiatan Permendagri Nomor 90 tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi, dan Nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan Daerah							
Tujuan: Terlaksananya PSU Perumahan untuk								

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Data Dasar (Base-Line)	Indikator Gender
meningkatkan fungsi hunian di Kabupaten Pesisir Selatan		pelaksanaan Sanitasi layak d. Aspek Manfaat: Bantuan bisa langsung dimanfaatkan dan difungsikan oleh masyarakat.						hunian yang Layak • Kegiatan 2 : Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan Input : Rp 39.999.980,- Output: Tersedianya Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan Outcome: Meningkatnya Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER		Sebab Kesenjangan Eksternal	KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal		Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Data Dasar (Base-Line)	Indikator Gender
								di Perumahan untuk menunjang hunian yang Layak

Painan Maret 2021

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN
DAN PERTANAHAN KAB. PESISIR SELATAN



GENDER BUDGET STATEMENT

(Pernyataan Anggaran Gender)

OPD : DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
TAHUN ANGGARAN : 2022

PROGRAM	PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH
KODE PROGRAM	1.04.04
ANALISA SITUASI	1. Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender) Jumlah rumah tahun 2017 sebanyak 107.469 dari 182 Nagari di kabupaten Pesisir Selatan. Adapun rumah layak 113.778 rumah dan tidak layak 6.309 rumah Tahun 2018 Jumlah rumah menjadi 114.188 rumah, adapun yang layak 110.095 rumah dan tidak layak 4.093 Rumah. Pada tahun 2019 jumlah rumah meningkat 114.238.Sedangkan rumah tidak layak huni 2.467 Unit. Adapun rumah layak huni menjadi 111.771 rumah Pada Tahun 2020 jumlah rumah 114.308 Unit. Penanganan RTLH Tahun 2020 adalah sebanyak 2.309 Unit. Jumlah rumah tidak layak huni yang sudah direhap dari tahun 2017-2020 sebanyak 7.937 unit rumah. Data TNP2K Tahun 2016 Jumlah RTLH adalah 6.387 Unit. Sedangkan total penanganan adlah 7.937 Unit. Berarti sudah melebihi target dan data sebanyak 1.552 Unit. Dasar hukum kegiatan Permendagri Nomor 90 tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi, dan Nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan Daerah. 2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender a. Faktor Kesenjangan Isu kesenjangan yang dapat disimpulkan antara lain: - Aspek Akses: Tidak semua rumah tidak layak huni bisa direhabilitasi. Akses penerima bantuan dan kriteria kegiatan terbatas. - Aspek Partisipasi: Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menentukan skala prioritas kebutuhan primer dan sekunder nya. - Aspek Kontrol: kontrol dari tenaga pendamping berpengaruh terhadap pelaksanaan rumah layak huni - Aspek Manfaat: Karna bantuan rumah tidak layak huni masih bersifat stimulan (ransangan) dan masyarakat harus menyediakan dana tambahan untuk menyelesaikan pembangunan rumah b. Penyebab Internal - keterbatasan anggaran. - Dinas belum memiliki data base yang valid jumlah rumah tidak layak huni - Masih kurangnya pemahaman wali nagari tentang kriteria rumah tidak layak huni yang berpengaruh terhadap data c. Penyebab Eksternal - Masih banyaknya data-data rumah tidak layak huni yang belum divalidasi - Lahan yang digunakan untuk pembangunan RTLH belum bebas atau belum dihibahkan
CAPAIAN PROGRAM	1. Tolak Ukur Terwujudnya Rumah Layak Huni di kab. Pesisir Selatan 2. Indikator dan Target Kinerja Kegiatan 1: Perbaikan Rumah Tidak Layak huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha Input : Rp. 9.484.879.890,- Output: Tersedianya pembangunan Rumah tidak layak huni dan Rehab Rumah Tidak Layak Huni

	Outcome: Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni bagi Masyarakat berpenghasilan Rendah • Kegiatan 2: Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha Input : Rp. 165.501.820,- Output: Tersedianya Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha Outcome: Meningkatnya Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	
JUMLAH ANGGARAN PROGRAM	Rp. 9.650.381.710,-	
RENCANA AKSI	Kegiatan 1	Perbaikan Rumah Tidak Layak huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha
		Masukan Rp.9.484.879.890,-
		Keluaran Tersedianya pembangunan Rumah tidak layak huni dan Rehab Rumah Tidak Layak Huni
		Hasil Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni bagi Masyarakat berpenghasilan Rendah
	Kegiatan 2	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha
		Masukan Rp. 165.501.820,-
		Keluaran Tersedianya Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha
		Hasil Meningkatnya Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha

PROGRAM	PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)
KODE PROGRAM	1.04.05
ANALISA SITUASI	3. Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender) Berdasarkan proposal dari wali nagari masih ada data masyarakat yang belum memiliki jamban. Data yang masuk dari wali nagari sebanyak 3.252 unit. Data Masyarakat yang belum memiliki Sambungan Listrik sebanyak 2.896 Unit Penanganan Sanitasi Tahun 2017 – 2020 : 1.626 Unit Penanganan Sambungan Listrik 2017 – 2020 sebanyak 1.417 Unit 4. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender d. Faktor Kesenjangan Isu kesenjangan yang dapat disimpulkan antara lain: • Aspek Akses: Tidak semua rumah masyarakat bias dibantu sanitasi layak dan sambungan listrik. Akses penerima bantuan dan kriteria kegiatan terbatas.. • Aspek Partisipasi: Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menentukan skala prioritas kebutuhan primer dan sekunder nya. • Aspek Kontrol: kontrol dari tenaga pendamping berpengaruh terhadap pelaksanaan Sanitasi layak • Aspek Manfaat: Bantuan bisa langsung dimanfaatkan dan difungsikan oleh masyarakat. e. Penyebab Internal • keterbatasan anggaran. • Dinas belum memiliki data base yang valid jumlah Masyarakat yang belum memiliki sanitasi layak dan sambungan listrik. • Masih kurangnya pemahaman wali nagari tentang kriteria masyarakat penerima bantuan adalah masyarakat berpenghasilan rendah f. Penyebab Eksternal • Masih banyaknya data-data rumah yang belum divalidasi • Lahan yang digunakan untuk pembangunan Sanitasi Layak yang belum bebas atau belum dihibahkan
CAPAIAN PROGRAM	3. Tolak Ukur Terwujudnya Rumah Bersanitasi Layak dan Memiliki Sambungan Listrik di kab. Pesisir Selatan 4. Indikator dan Target Kinerja • Kegiatan 1: Penyediaan Prasarana, sarana dan Utilitas umum di Perumahan untuk menunjang Fungsi Hunian Input : Rp. 2.073.281.740,- Output: Tersedianya PSU Perumahan untuk meningkatkan fungsi hunian Outcome: Meningkatnya Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk menunjang hunian yang Layak • Kegiatan 2: Penyediaan Prasarana, sarana dan Utilitas umum di Perumahan untuk menunjang Fungsi Hunian Input : Rp. 2.073.281.740,- Output: Tersedianya PSU Perumahan untuk meningkatkan fungsi hunian Outcome: Meningkatnya Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk menunjang hunian yang Layak

JUMLAH ANGGARAN PROGRAM	Rp. 2.073.281.740,-		
RENCANA AKSI	Kegiatan 1	Penyediaan Prasarana, sarana dan Utilitas umum di Perumahan untuk menunjang Fungsi Hunian	
		Masukan	Rp.2.073.281.740,-
		Keluaran	Tersedianya PSU Perumahan untuk meningkatkan fungsi hunian
		Hasil	Meningkatnya Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk menunjang hunian yang Layak
	Kegiatan 2	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan	
		Masukan	Rp 39..999.980,-
		Keluaran	Tersedianya Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan
		Hasil	Meningkatnya Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk menunjang hunian yang Layak

Painan Maret 2021

Kepala OPD DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN
DAN PERTANAHAN KAB. PESISIR SELATAN,

